DIALEKTIKA: JOURNAL OF ISLAMIC HISTORY

PROBLEMATIKA KONFLIK UMAT ISLAM DI SURIAH & DI IRAK TAHUN 2002-2011

Via Nuhasanah*)

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292. Indonesia
*Email: via.nurhasanah98@gmail.com

Diterima: 15-04-2025, Direvisi: 06-05-2025,
Diterima: 17-05-2025 Diterbitkan: 17-05-2025

Abstract

The conflicts in Syria and Iraq have been a concern of the World Islamic Community in recent years. This paper discusses the underlying issues of the conflict, particularly from the perspective of Muslims involved in the region. Using a descriptive analysis approach, this article discusses the background of the causes of the conflict, including ethnic, religious, political, and economic factors that affect the dynamics of the conflict in both countries. In addition, this article also discusses the impact of the conflict on Muslims in Syria and Iraq, including the damage to infrastructure, loss of life, refugees, and psychological trauma it causes. This in-depth analysis is important for understanding the complexity of conflicts in the Middle East and exploring possible solutions to ease tensions and echo peace and stability in the region.

Keywords:
Syrian Conflict, Iraq Conflict, Gulf War 3, Middle East Conflict, Arab Spring

Abstrak

Konflik di Suriah dan Irak telah menjadi perhatian Masyarakat Islam Dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Makalah ini membahas permasalahan yang mendasari konflik tersebut, khususnya dari sudut pandang umat Islam yang terlibat di wilayah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, artikel ini membahas latar belakang penyebab konflik, termasuk faktor etnis, agama, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi dinamika konflik di kedua negara. Selain itu, artikel ini juga membahas dampak konflik tersebut terhadap umat Islam di Suriah dan Irak, termasuk kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa, pengungsi, dan trauma psikologis yang diakibatkannya. Analisis mendalam ini penting untuk memahami kompleksitas konflik di Timur Tengah dan mengeksplorasi solusi yang mungkin untuk meredakan ketegangan dan menggaungkan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

Kata-kata Kunci:
Konflik Suriah, Konflik Irak, Perang Teluk 3, Konflik Timur Tengah, Arab Spring

PENDAHULUAN

Konflik di Suriah dan Irak telah menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir ini, dengan dampak yang meluas dan kompleks bagi wilayah Timur Tengah dan dunia secara keseluruhan. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara tersebut secara langsung, tetapi juga menimbulkan implikasi yang mendalam terhadap stabilitas regional, keamanan internasional, dan kemanusiaan. Pada dasarnya, kedua konflik ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, kelompok oposisi, dan aktor-aktor non-negara seperti kelompok militan, dengan beragam agenda politik, etnis, agama, dan ekonomi.

Di balik dinamika konflik yang rumit ini, umat Islam memainkan peran sentral sebagai pemain utama dan juga sebagai korban dari kekerasan yang terjadi dalam konteks ini, penting untuk memahami latar belakang yang mendasari konflik di Suriah dan Irak, serta dampaknya terhadap umat Islam yang tinggal di kedua negara tersebut. Faktor-faktor seperti sejarah etnis dan agama, ketegangan politik internal, intervensi asing, persaingan kekuasaan regional, dan masalah ekonomi menjadi landasan yang perlu dipelajari secara mendalam.

Penelitian tentang problematika konflik umat Islam di Suriah dan Irak memiliki relevansi yang besar dalam konteks menjelaskan kompleksitas konflik di Timur Tengah serta merumuskan solusi yang dapat membawa perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang latar belakang dan dinamika konflik, mungkin ada peluang untuk merintis jalan menuju rekonsiliasi dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang besar dalam mendukung upaya pemecahan konflik dan pembangunan yang berkelanjutan di Suriah dan Irak.

Rumusan masalah yang dibahas pertama mengenai latar belakang konflik di Suriah dan Irak dan dampaknya, kedua intervensi asing dan persaingan kekuasaan regional memengaruhi dinamika konflik di negara Suriah dan Irak, ketiga solusi dalam meredakan ketegangan dan mengakhiri konflik. Tujuan penelitian diantaranya untuk memahami latar belakang konflik di Suriah dan Irak dan dampaknya, untuk menganalisis intervensi asing dan persaingan kekuasaan regional memengaruhi dinamika konflik di negara Suriah dan Irak dan untuk Mengatahui olusi dalam meredakan ketegangan dan mengakhiri konflik.

METODE PENELITIAN

Metede penelitian menggunakan sejarah dimana tahapan pertama adalah heuristik. Heuristik adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau evidensi sejarah. Pada tahapan heuristik ini digunakan studi kepustakaan, saya berusaha mencari dan mengumpulkan sumber berupa sumber-

sumber tertulis seperti buku, Jurnal, surat kabar, arsip dan literatur-literatur lainnya. Sumber yang dikumpulkan yang membahas tentang konflik di negara Suriah dan negara Irak, sumber tulisan tersebut penulis dapatkan dari beberapa tempat diantaranya koleksi perpustakaan, media online dan file Pdf.

Adapun sumber-sumber yang didapatkan selama penelusuran sumber tersebut diantaranya adalah buku berjudul "Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional" karya Dina Y. Sulaeman; Surat kabar Republika Terbit Selasa 15 Dec 2020 07:00 WIB dengan judul "Sejarah Hari Ini: AS Akhiri Perang Irak ", Jurnal dengan judul "Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah" tulisan Agus Herlambang.

Tahapan kedua dari metode sejarah adalah tahapan kritik, yaitu proses verifikasi sumber yang telah didapatkan untuk memperoleh otentisitas dan kredibelitas dari sumber tersebut. Adapun tahapan kritik ini terbagai menjadi dua, yaitu kritik eksternal yang berkaitan dengan otentisitas atau keaslian sumber dan kritik internal yang berkaitan dengan kredibilitas sumber.[1]

Dalam hal kaitannya dengan kritik eksternal yang dilakukan untuk menentukan otentisitas sumber yang diteliti, yaitu otentik atau tidaknya, utuh atau tidaknya, ataupun asli atau palsu sumber tersebut. Penulis melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumber tersebut dengan menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila sumber itu merupakan dokumen tertulis, maka harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya dan segi penampilannya yang lain otentisitas itu minimal diuji berdasarkan lima pertanyaan pokok, yaitu: 1) Kapan sumber itu dibuat? 2) Dimana sumber itu dibuat? 3) Siapa yang membuat? 4) dari bahan apa sumber itu dibuat? 5) Apakah sumber itu dalam bentuk asli?[2]

Sementara itu, dalam proses kritik internal yang dilakukan untuk menentukan kredibilitas sumber dalam penulisan makalah ini, yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) meneliti sifat dari sumber yang digunakan, apakah bersifat resmi atau tidak? 2) meneliti sumber tersebut dari aspek mental penulisnya dan apakah penulis sumber tersebut mau atau tidak dalam menyampaikan informasi yang dimilikinya? 3) membandingkan dengan sumber yang lain, 4) melakukan korborasi atau saling mendukung antar sumber yang tersedia.16 Dengan melakukan kritik tersebut, penulis dapat menentukan shahih tidaknya bukti atau fakta sejarah dari sumber yang didapatkan.

Tahapan yang ketiga adalah interpretasi atau penafsiran, yaitu proses penafsiran sejarah dari sumber-sumber yang telah diverifikasi.[3] Penafsiran ini dapat berupa analisis atau menguraikan maupun sintesis atau menyatukan berbagai fakta. Fakta-fakta yang didapat dari hasil kritik di atas, kemudian penulis interpretasikan

[1] Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 59-61.
[2] Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm. 59-60.
[3] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah,* (2008), hlm. 102.

sehingga dalam memahami permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat ditarik garis besarnya.

Interpretasi atau penafsiran sejarah disebut juga analisis sejarah. Analisis ini berarti menguraikan secara terminologis objek kajian yang sedang diteliti. Menindaklanjuti hal tersebut, maka teori yang dapat digunakan untuk menganalisis terkait dengan judul penelitian yang sesuai, dapat menggunakan Teori Konflik Sosial: Teori ini menekankan peran struktur sosial dalam menciptakan ketegangan dan konflik di dalam suatu negara. Konflik bisa muncul karena ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, atau ketidakpuasan terhadap sistem politik.

Historiografi merupakan proses akhir yang dilakukan setelah melakukan beberapa proses di atas, yang di mulai dari tahapan heuristik, lalu tahapan kritik dan interpretasi. Maka setelah semua data tersusun, maka kemudian hasilnya di tuliskan. Historiografi merupakan rekontruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menemouh proses menguji dan menganalisa secra kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.[4]

Pada tahapan ini, peneliti menggunakan penulisan historis, jenis penulisan ini mengungkapkan fakta-fakta guna menjawab pertanyaan. Sistematika penulisan ini diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu: Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan beberapa bagian mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, , dan metode penelitian. Pembahasan yaitu membahas tentang latar belakang konflik di negara Suriah dan negara Irak, Konflik internal dan Intervensi Multinasional serta Solusi untuk meredakan konflik di kedua negara tersebut. Kesimpulan yaitu berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Pada bagian akhir, dilengkapi dengan Simpulan dan daftar sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suriah modern, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah di tepi Laut Mediterania, adalah salah satu wilayah berpenghuni paling kuno di Bumi.[5] Sepanjang zaman kuno, Suriah diduduki dan diperintah oleh beberapa kerajaan, termasuk Mesir, Het, Sumeria, Mitanni, Asyur, Babilonia, Kanaan, Fenisia, Aram, Amori, Persia, Yunani, dan Romawi.

Ketika Kekaisaran Romawi jatuh, Suriah menjadi bagian dari Kekaisaran Timur atau Bizantium. Pada tahun 637 M, tentara Muslim mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan menguasai Suriah. Agama Islam menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah, dan berbagai faksi mulai berkuasa. Damaskus menjadi ibu kota dunia Islam, namun digantikan oleh Bagdad di Irak sekitar tahun 750 M. Perubahan ini menyebabkan penurunan perekonomian di Suriah.

[4] Louis Gottschalk, 1985, Mengerti Sejarah, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 32.
[5] Sejarah Syria, https://www-history-com.translate.goog/topics/middle-east/the-history-of-syria? Diakses pada 10 Maret 2023

Pada tahun 1516, Kesultanan Utsmaniyah menaklukkan Suriah dan tetap berkuasa hingga tahun 1918. Periode ini dianggap relatif damai dan stabil dalam sejarah Suriah. Selama Perang Dunia I , diplomat Perancis dan Inggris membagi Kesultanan Utsmaniyah menjadi beberapa zona, sebagai bagian dari Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Berdasarkan Perjanjian Sykes-Picot, sebagian besar wilayah Arab di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah dibagi menjadi wilayah pengaruh Inggris atau Prancis dengan berakhirnya Perang Dunia I. Pasukan Inggris dan Arab merebut Damaskus dan Aleppo pada tahun 1918, dan Prancis menguasai Suriah dan Lebanon pada tahun 1920. Pengaturan ini mengakhiri sekitar 400 tahun kekuasaan Ottoman di wilayah tersebut.

Pemerintahan Perancis menyebabkan pemberontakan dI kalangan masyarakat di Suriah. Dari tahun 1925 hingga 1927, warga Suriah bersatu melawan pendudukan Perancis dalam apa yang sekarang dikenal sebagai Pemberontakan Besar Suriah. Pada tahun 1936, Prancis dan Suriah merundingkan perjanjian kemerdekaan, yang memungkinkan Suriah tetap merdeka namun memberikan kekuatan militer dan ekonomi kepada Prancis.

Selama Perang Dunia II , pasukan Inggris dan Prancis Merdeka menduduki Suriah—namun tak lama setelah perang berakhir, Suriah resmi menjadi negara merdeka pada tahun 1946.

Suriah bergabung dengan Mesir dan menjadi Republik Persatuan Arab pada tahun 1958, namun persatuan tersebut terpecah beberapa tahun kemudian pada tahun 1961. Tahun 1960an menyebabkan lebih banyak kudeta militer, pemberontakan, dan kerusuhan. Pada tahun 1963, Partai Baath Sosialis Arab, yang aktif di seluruh Timur Tengah sejak akhir tahun 1940-an, merebut kekuasaan Suriah melalui kudeta yang dikenal sebagai Revolusi Baath.

Pada tahun 1967, selama Perang Enam Hari, Israel merebut Dataran Tinggi Golan, sebuah dataran tinggi berbatu yang terletak di barat daya Suriah. Konflik atas wilayah yang didambakan ini berlanjut selama bertahun-tahun dan masih terus berlanjut.

Pada tahun 1970, Hafez al-Assad, menteri pertahanan Suriah, menggulingkan pemimpin de facto Suriah, Salah Jadid. Dia tetap berkuasa sebagai presiden selama 30 tahun, hingga kematiannya pada tahun 2000. Hafez al-Assad adalah bagian dari Islam Alawi, yang merupakan sekte minoritas Syiah. Selama masa kepresidenannya, Hafez berjasa memperkuat militer Suriah dengan bantuan Soviet. Suriah dan Mesir berperang dengan Israel pada tahun 1973. Tak lama setelah konflik ini, Suriah juga terlibat dalam perang saudara di Lebanon, dan sejak saat itu Suriah mempertahankan kehadiran militernya.

Pada tahun 1982, Ikhwanul Muslimin mengorganisir pemberontakan melawan rezim Assad di kota Hama, dan Assad menanggapinya dengan menangkap, menyiksa dan mengeksekusi pemberontak politik. Perkiraannya berbeda-beda, namun banyak ahli yakin pembalasan tersebut merenggut nyawa sekitar 20.000

warga sipil. Pada tahun yang sama, Israel menginvasi Lebanon dan menyerang tentara Suriah yang ditempatkan di sana. Namun pada tahun 1983, Israel dan Lebanon mengumumkan bahwa permusuhan antara kedua negara telah berakhir.

Menjelang akhir hayatnya, Hafez berusaha menjalin hubungan yang lebih damai dengan Israel dan Irak. Ketika Hafez al-Assad meninggal pada tahun 2000, putranya Bashar menjadi presiden pada usia 34 tahun. Setelah Bashar mengambil alih kekuasaan, konstitusi diamandemen untuk mengurangi usia minimum presiden dari 40 tahun menjadi 34 tahun. Sebagai seorang mahasiswa kedokteran, Bashar bukanlah pilihan pertama sebagai penggantinya. Kakak laki-lakinya, Bassel, adalah orang berikutnya yang menggantikan ayahnya, tetapi dia terbunuh dalam kecelakaan mobil pada tahun 1994. Pada awal masa kepresidenannya, Bashar al-Assad membebaskan 600 tahanan politik, dan masyarakat Suriah berharap pemimpin baru mereka akan memberikan lebih banyak kebebasan dan mengurangi penindasan dibandingkan ayahnya. Namun, dalam setahun, Bashar menggunakan ancaman dan penangkapan untuk menghentikan aktivisme pro-reformasi.

Latar Belakang Konflik Internal dan Multinasional

Pada tahun 2002, Amerika Serikat menuduh Suriah memiliki senjata pemusnah massal dan mendaftarkan negara tersebut sebagai anggota negara yang disebut sebagai “poros kejahatan”. Pemerintah Suriah juga dituduh terlibat dalam pembunuhan Rafic Hariri, perdana menteri Lebanon, pada tahun 2005.

Konflik di Suriah
Sumber: BBC

Konflik internal di Suriah muncul pada awal Maret 2011 saat sejumlah pemuda Deraa menulis dengan kata-kata anti pemerintah. Setelah itu mereka ditangkap oleh kepala sekolah, dan dinas intelejen serta di penjarakan. Pemerintah mengumumkan pembentukan komite investigasi pada 24 Maret 2011, dan pemerintah Bashar memerintahkan agar seluruh demonstran yang ditahan untuk dibebaskan. Namun, hal ini tidak menghilangkan kemarahan orang tua yang anaknya dipenjarakan, maka demonstrasi tidak dapat dihindari menjadi semakin meluas.[6] Kemudian tercetus untuk membentuk oposisi guna menurunkan rezim penguasa.

Kelompok oposisi yang terbentuk dalam konflik ini terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, kelompok oposisi pro-reformasi, antara lain: (1) Kelompok oposisi yang tergabung dalam FSA (Free Syrian Army) yang dipimpin oleh Kolonel Riadh Assad. Merupakan kelompok angkatan bersenjata pihak oposisi yang anggotanya terdiri dari mantan militer Assad yang membelot dan sukarelawan rakyat sipil. Kelompok ini mendapat dukungan senjata dan dana dari AS; (2) SNC atau sekarang lebih dikenal dengan SNCORF (Syrian National Coalition for Opotition and Revolutionary Force) dibawah pimpinan Abdul Basith Saida, yang merupakan seorang akademisi Kurdi. Kelompok ini ingin memperluas basis politik kelompok oposisi ditingkat internasional, dan mendukung langkah-langkah penggulingan Assad melalui intervensi internasional; (3) NCC (The National Coordination Committee for Democratic Change) yang dipimpin Hassan Abdul Azhim, kelompok ini mendukung perubahan rezim tetapi tidak dengan cara intervensi asing.

Kedua, kelompok oposisi yang mucul dari gerakan Islam Radikal yang juga menentang pemerintahan Bashar Al-Assad, yaitu: (1) Kelompok oposisi radikal pecahan ISIS yaitu Jabhah Al-Nusrah yang menginginkan pendirian negara Khalifah; (2) ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang ingin memperluas pengaruhnya di Suriah. Dan merupakan gerakan transnasional yang memiliki anggota di luar Suriah. Kelompok- kelompok tersebut secara nyata didukung oleh negara-negara Arab dan Amerika Serikat melalui Syrian Support Group yang bermarkas di Doha.

Dengan keikutsertaan para kelompok oposisi demokratis dan sekuler pada pemilu dan referendum yang diadakan pada tahun 2011, hal ini membuktikan bahwa pihak oposisi demokratis dan pemerintah Bashar telah berdamai. Namun adanya kelompok oposisi radikal dan teroris seperti FSA, Jabhat al Nusrah dan ISIS membuat konflik di Suriah masih berjalan hingga saat ini. Gencatan senjata yang ditawarkan pemerintah tidak diinginkan oleh para oposisi radikal karena mereka hanya menginginkan konflik yang bersifat zero sum game dimana tidak adanya kerjasama atau kompromi dalam konflik.

Berdasarkan resolusi-resolusi yang telah dibuat Dewan Keamanan, Majelis Umum, serta Sekretaris Jenderal dapat dilihat bahwa ketiga organ utama PBB

[6] Dina Y. Sulaeman, 2013. Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional, Penerbit : IIMan Depok

tersebut telah berperan sesuai dengan yang wewenang yang dicantumkan dalam Piagam PBB. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan tersebut bersifat mengikat sesuai yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 Piagam PBB, bahwa tanggung jawab untuk menjaga perdamaian internasional telah diserahkan pada Dewan Keamanan PBB dan negara anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan Dewan Keamanan. Jadi apabila negara yang bersengketa tidak menaati keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan maka akan dijatuhkan sanksi terhadapnya.[7]

Penyelesaian sengketa Suriah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa

PBB telah melakukan langkah negosiasi yaitu dalam bentuk Konferensi Jenewa, meskipun belum ditemukan jalan keluar namun para pihak masih menginginkan penyelesaian yang komprehensif dan adil. Hasil Konferensi Jenewa berupa pemerintahan transisi masih terus diusahakan oleh negara gabungan Arab-Barat. Langkah mediasi dan jasa-jasa baik yang telah diterapkan oleh PBB menemui kegagalan, berdasarkan Pasal 33 Piagam masih ada langkah konsiliasi, arbitrase, serta melalui Mahkamah Internasional. Namun ketiga langkah tersebut tidak dapat diterapkan pada sengketa Suriah, karena konsiliasi sifat putusannya tidak mengikat, jadi tidak akan efektif apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase dan Mahkamah Internasional juga tidak dapat diterapkan karena untuk menyerahkan sengketa ke kedua badan tersebut harus berdasarkan kesepakatan negara, dan untuk pihak yang bersengketa di Mahkamah Internasional harus negara, tidak bisa salah satu pihaknya individu atau organisasi internasional.

Berdasarkan uraian di atas maka langkah penyelesaian sengketa Suriah yang tepat melalui PBB adalah dengan penerapan pemerintahan transisi, hasil dari negosiasi saluran diplomatik Konferensi Jenewa.

Sejarah Singkat Negara Irak

Pada tahun 600 Irak menjadi provinsi Persia Kekaisaran Sasanian, yang menjadi miliknya selama tiga abad. Ini mungkin merupakan wilayah terpadat dan terkaya di Timur Tengah , dan pertanian irigasi intensif di hilir sungai Tigris dan Efrat serta anak sungai seperti Diyālā dan Kārūn membentuk basis sumber daya utama monarki Sasanian. Nama Irak tidak digunakan saat ini; pada pertengahan abad ke-6 kerajaan Sasanian telah dibagi oleh Khosrow I menjadi empat bagian, yang bagian baratnya, disebut Khvarvaran, mencakup sebagian besar wilayah Irak modern. Nama Irak banyak digunakan dalam sumber-sumber Arab abad pertengahan untuk wilayah di tengah dan selatan republik modern ini karena istilah geografis dan bukan istilah politik, yang tidak menyiratkan batasan pasti. Wilayah Irak modern di utara Tikrīt pada zaman Muslim dikenal sebagai Al-Jazīrah , yang berarti “Pulau” dan mengacu pada “pulau” di antara sungai Tigris dan Efrat (yaitu, Mesopotamia). Di selatan dan

[7] Devianti Sekar Ayu*, Rahayu, Soekotjo Hardiwinoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016

barat terbentang Gurun Arab , yang sebagian besar dihuni oleh suku-suku Arab yang kadang-kadang mengakui kekuasaan raja-raja Sasan. Hingga tahun 602, perbatasan gurun telah dijaga oleh Raja Lakhmid dari Al-Ḥīra , yang juga orang Arab tetapi memerintah negara penyangga yang menetap. Pada tahun itu Khosrow II (Parvīz) dengan gegabah menghapuskan kerajaan Lakhmid dan membuka perbatasan bagi serangan pengembara. Lebih jauh ke utara, bagian barat dibatasi oleh Kekaisaran Bizantium. Perbatasan tersebut kurang lebih mengikuti perbatasan Suriah-Irak modern dan berlanjut ke utara hingga Turki modern, meninggalkan Nisibis (Nusay bin modern) sebagai benteng perbatasan Sasan sementara Bizantium menguasai Dārā dan Amida di dekatnya (Diyarbakır modern).

Penduduknya berasal dari latar belakang campuran. Ada kelas atas Persia yang aristokrat dan administratif, tetapi sebagian besar penduduknya adalah petani berbahasa Aram. Sejumlah besar orang Arab tinggal di wilayah tersebut, sebagian besar dari mereka bekerja sebagai penggembala di sepanjang pinggiran barat wilayah pemukiman, namun ada pula yang berprofesi sebagai warga kota, khususnya di Al-Ḥīra. Selain itu, terdapat suku Kurdi, yang tinggal di sepanjang kaki Pegunungan Zagros, dan sejumlah besar orang Yunani, sebagian besar merupakan tawanan yang ditangkap selama berbagai kampanye Sasanian ke Suriah Bizantium.

Keberagaman etnis diimbangi dengan pluralisme agama. Agama negara Sasanian, Zoroastrianisme, sebagian besar terbatas pada kelas penguasa Persia. Mayoritas penduduknya, terutama di bagian utara negara itu, mungkin mengalami hal tersebut Kristen. Mereka terpecah secara tajam karena perbedaan doktrin menjadi kelompok miaphysites, yang terkait dengan Gereja Jacobite di Suriah, dan Nestorian, terkait dengan Gereja Timur. Kaum Nestorian adalah yang paling tersebar luas dan ditoleransi oleh raja-raja Sasania karena penentangan mereka terhadap umat Kristen di Kekaisaran Romawi, yang menganggap kaum Nestorian sebagai bidah. Kaum miafisit lebih dicurigai dan kadang-kadang dianiaya, namun kedua kelompok tersebut mampu mempertahankan hierarki gerejawi, dan kaum Nestorian memiliki pusat intelektual penting di Nisibis. Pada saat itu daerah sekitar kota kuno Babel mempunyai populasi orang Yahudi yang besar, baik keturunan orang buangan pada zaman Perjanjian Lama maupun orang-orang yang berpindah agama secara lokal. Selain itu, di bagian selatan negara itu, terdapat banyak penganut paganisme Babilonia kuno, serta penganut Mandaean dan gnostik.

Pada awal abad ke-7 stabilitas dan kesejahteraan masyarakat multikultural ini terancam oleh invasi. Pada tahun 602 Khosrow II melancarkan invasi besar terakhir Persia ke Kekaisaran Bizantium. Pada awalnya dia sukses secara spektakuler; Suriah dan Mesir jatuh, dan Konstantinopel (Istanbul modern) sendiri terancam. Kemudian keadaan mulai berbalik, dan pada tahun 627–628 Bizantium, di bawah kepemimpinan kaisar Heraclius, menyerbu Irak dan menjarah ibu kota kekaisaran di Ctesiphon. Para penyerbu tidak tinggal diam, namun Khosrow didiskreditkan, digulingkan, dan dieksekusi. Terjadilah periode pertikaian di antara para jenderal dan

anggota keluarga kerajaan yang meninggalkan negara tersebut tanpa kepemimpinan yang jelas. Kekacauan ini juga telah merusak sistem irigasi, dan mungkin pada saat inilah sebagian besar wilayah di bagian selatan negara tersebut kembali menjadi lahan rawa, yang sebagian besar masih bertahan hingga zaman modern. Dengan tanah yang hancur inilah para perampok Muslim paling awal melakukan kontak.

Konflik pertama antar lokal Suku Badui dan pasukan Sasanian tampaknya terjadi pada tahun 634, ketika bangsa Arab dikalahkan dalam Pertempuran Jembatan. Di sana kekuatan sekitar 5.000 Muslim di bawah pimpinan Abū ʿUbayd al-Thaqafī dikalahkan oleh Persia. Pada tahun 637, pasukan Muslim yang jauh lebih besar di bawah Saʿd ibn Abī Waqqāṣ mengalahkan pasukan utama Persia di Pertempuran Al-Qādisiyyah dan melanjutkan pemecatan Ctesiphon. Pada akhir tahun berikutnya (638), itu Kaum Muslim telah menaklukkan hampir seluruh Irak, dan raja Sasan terakhir, Yazdegerd III, melarikan diri ke Iran, di mana ia terbunuh pada tahun 651.

Penaklukan Muslim diikuti oleh imigrasi massal orang-orang Arab dari Arab bagian timur dan Oman. Para pendatang baru ini tidak menyebar dan menetap di seluruh negeri; sebaliknya mereka mendirikan dua kota garnisun baru, di Kūfah dekat Babilonia kuno, dan di Basra di selatan. Tujuannya adalah agar umat Islam menjadi komunitas terpisah yang terdiri dari para pejuang dan keluarga mereka yang hidup dari pajak yang dibayarkan oleh penduduk setempat. Di bagian utara negara itu, Mosul mulai muncul sebagai kota terpenting dan basis gubernur dan garnisun Muslim. Selain elite Persia dan pendeta Zoroaster yang harta bendanya disita, sebagian besar masyarakat setempat diperbolehkan mempertahankan harta benda dan agamanya.

Irak menjadi provinsi Muslim Kekhalifahan, yang membentang dari Afrika Utara dan kemudian Spanyol di barat hingga Sind (sekarang Pakistan selatan) di timur. Pada awalnya ibu kota Kekhalifahan berada di Madinah, namun setelah pembunuhan khalifah ketiga, ʿUtsmān ibn ʿAffān, pada tahun 656, penggantinya, sepupu dan menantu Nabi Muhammad ʿAlī, menjadikan Irak sebagai basisnya. Namun pada tahun 661, ʿAlī dibunuh di Kūfah, dan Kekhalifahan diserahkan kepada saingannya. Keluarga Umayyah di Suriah. Irak menjadi provinsi bawahan, meskipun merupakan wilayah terkaya di dunia Muslim dan memiliki populasi Muslim terbesar. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan terus-menerus terhadap pemerintahan Bani Umayyah dalam berbagai bentuk.

Rakyat Irak mendapat kesempatan setelah kematian khalifah Yazīd I pada tahun 683, ketika Bani Umayyah menghadapi ancaman dari berbagai pihak. Di Kūfah inisiatif ini diambil oleh al-Mukhtār ibn Abī ʿUbayd, yang didukung oleh banyak mawālī (tunggal, mawlā ; non-Arab yang masuk Islam), yang merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Al-Mukhtār terbunuh pada tahun 687, tetapi Bani Umayyah menyadari bahwa diperlukan peraturan yang ketat. Khalifah ʿAbd al-Malik (685–705) menunjuk orang yang menakutkanal-Ḥajjāj ibn Yūsuf al-Thaqafī sebagai

gubernurnya di Irak dan seluruh wilayah timur. Al-Ḥajjāj menjadi legenda sebagai penguasa yang tegas namun adil. Tindakan tegasnya menimbulkan tentangan dari elit Arab setempat, dan pada tahun 701 terjadi pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh Muhammad ibn al-Ashʿath. Pemberontakan dapat dikalahkan hanya dengan bantuan tentara Suriah. Irak sekarang menjadi provinsi yang ditaklukkan, dan al-Ḥajjāj mendirikan kota baru di Wāṣit ("Medial"), di tengah-tengah antara Kūfah dan Basra, untuk menjadi basis garnisun permanen Suriah. Dalam cara yang lebih positif, ia mendorong warga Irak untuk bergabung dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Qutaybah ibn Muslim yang antara tahun 705 dan 715 menaklukkan Asia Tengah demi Islam. Bahkan setelah kematian al-Ḥajjāj pada tahun 714, cengkeraman Umayyah-Suriah di Irak tetap kuat, dan kebencian meluas.[8]

Latar Belakang Perang Teluk 1

Perang Teluk 1 juga dikenal sebagai Perang Irak dan Iran. beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang: Adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Shatt Al Arab. Sungai Shatt Al Arab adalah jalur perariran strategis yang memisahkan Irak-Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar, wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. konflik ini sempat diselesaikan dalam Perjanjian Algier pada tahun 1975. Perjanjian ini berhasil mempertemukan Saddam Hussein sebagai presiden Irak dan Mohammad Reza Pahlavi sebagai pemimpin Iran. Secara garis besar, dalam perjanjian ini, Iran harus menghentikan dukungan kepada pemberontak suku Kurdi. Selain itu, perbatasan wilayah Irak-Iran di Shatt al Arab akan digeser dari wilayah timur ke tengah perairan.

Antara tahun 1978 hingga tahun 1979, di Iran terjadi Revolusi Islam yang menandai kejatuhan kekuasaan Kerajaan Pahlavi. Pada saat itu, Ayatollah Ruhollah Khomeini berhasil mengubah Iran menjadi negara Islam bermazhab Syiah. Sementara, Saddam Husein, yang merupakan seorang muslim aliran Sunni yang khawatir revolusi Islam di Iran akan menyebar ke negara-negara Arab lainnya.

Pada April 1980, Perdana Menteri Irak, Tariq Azis mendapatkan serangan granat. Pada saat itu, sedang berlangsung acara Konferensi Ekonomi Internasional yang diselenggarakan oleh persatuan mahasiswa Asia di Irak.

Karena kejadian itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang. Saddam Hussein kemudian mengusir ribuan orang Iran dari Irak, serta mengecam Khomeini. Tidak hanya itu saja, Saddam juga menuntut Iran untuk kembali merundingkan Peranjian Algiers tahun 1975, serta menuntut pengembalian tiga pulau kecil di Selat Hormuz. Pada 4 September 1980, Iran tiba-tiba saja melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak, seperti desa Khanaqin, Muzayriah, Zurbatiyah, Qata Mandali dan Mustapha dan instalasi minyak Neft Khaneh. Akibat dari serangan ini, puluhan rakyat Irak menjadi korban. Irak pun tidak tinggal diam.

[8] https://www-britannica-com.translate.goog/place/Iraq/History

Tidak sampai sebulan, tepatnya pada 22 September 1980 Irak memulai serangan balasan. Irak mulai menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Mehrabad, Teheran, Iran.

Irak berhasil menduduki Pulau Tumb Besar dan Tumb Kecil (wilayah sengketa kedua negara) yang sudah dikuasai oleh Iran selama ratusan tahun. Serangan ini kemudian dianggap sebagai kemenangan Irak. Akan tetapi Iran tidak tinggal diam, Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah Basra dan Wasit. Perang ini terus berlanjut, aksi saling balas serang pun tidak bisa dihindari. Hingga akhirnya pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Norwuz yang membawa dampak besar bahkan ke negara-negara tetangganya. Dampaknya sangat buruk. Sumber daya air disekitar wilayah Teluk tercemar oleh minyak. Hal ini membuat harga air minum di wilayah ini sangat mahal. Bahkan, harga satu liter air pada saat itu hamper lima kali dari harga standar minyak mentah OPEC. Beberapa negara yang terkena dampaknya adalah Qatar, Kuwait dan Bahrain. Perang ini terus berlanjut hingga tahun ke delapan.

Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata nggak membuahkan hasil. Dalam perang ini, tidak ada yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 598 Tahun 1988.

Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada Perjanjian Algiers yang sudah disusun sejak tahun 1975, dan sudah disepakati oleh keduanya. Menjelang berakhirnya perang tersebut, Irak mengembalikan sebagian wilayah di Shatt al Arab kepada Iran.

Latar Belakang Perang Teluk 2

Jika pada Perang Teluk 1 Irak berkonflik dengan Iran, maka pada Perang Teluk 2, Irak berkonflik dengan Kuwait. Sebenarnya, perang ini dipicu karena adanya serangan Irak kepada Kuwait pada Agustus 1990. Ketidakstabilan kondisi pereknomian Irak paska Perang Teluk 1

Perang antara Irak dan Iran dalam kurun 1980–1988 tentunya berdampak pada perekonomian Irak. Pada saat itu Irak sempat menuduh Kuwait mencuri minyak dari dari ladang minyak Rumaila yang merupakan wilayah Irak.

Padahal, saat itu Kuwait menentang dengan mengatakan bahwa Irak yang malah berusaha mengebor sumur minyak di wilayah Kuwait. Klaim wilayah yang penuh minyak bumi ini merupakan salah satu upaya Irak dalam memulihkan perekonomiannya.

Rendahnya harga minyak yang ditetapkan oleh Kuwait membuat Saddam Hussein berpendapat bahwa Kuwait akan terus menjadi kaki tangan Barat. Berdasarkan batas wilayan yang ditetapkan dari warisan pemerintahan Turki Usmani, Kuwait merupakan bagian dari Republik Irak. Saddam Hussein menyebut Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak.

Pada Perang Teluk 1, Kuwait merupakan sekutu Irak dalam menghadapi Iran. Nah, alasan inilah yang digunakan oleh Irak agar Kuwait menghapuskan utang Irak sebesar 14 miliar dollar AS kepada Kuwait. Tapi, Kuwait menolak dan meminta utang tersebut tetap dilunasi. Otomatis, hubungan kedua negara ini semakin memanas.

Akhirnya, berdasarkan beberapa latar belakang di atas, pada pertengahan 1990, Irak pun mulai mempersiapkan serangan di perbatasan Kuwait. Irak mulai menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990. Sejak saat inilah, Perang Teluk 2 dimulai.

Sebenarnya, saat itu Saddam Hussein beranggapan negara-negara anggota Liga Arab akan netral dan tidak terlibat dalam invasi yang dijalankan Irak ke Kuwait. Tapi nyatanya, dua per tiga dari seluruh anggota Liga Arab tidak menyetujui serangan Irak tersebut.

Pada 3 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB mendesak Irak agar menarik pasukannya dari Kuwait. Tapi, Irak tidak menghiraukan. Pada 8 Agustus 1990, pemerintah Irak secara resmi menganeksasi Kuwait.

Akhirnya, negara-negara yang awalnya tidak terlibat dalam konflik ini seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet pergi ke Kuwait untuk melawan pasukan Irak. Gabungan koalisi ini berlandaskan Dewan Keamanan PBB yang secara resmi mengesahkan penggunaan "segala cara yang diperlukan" untuk melawan agresi Irak terhadap Kuwait. Saat itu, Dewan Keamanan PBB memberi batas kepada Irak agar menarik diri dari Kuwait maksimal pada 15 Januari 1991.

Karena Irak tidak segera menarik diri dari Kuwait, akhirnya pada 17 Januari 1991, pasukan Sekutu melancarkan serangan udara ke pasukan Irak. Serangan ini dikenal sebagai Operasi Badai Gurun. Dalam serangan ini, Irak berhasil dilemahkan.

Tidak hanya sampai di situ saja, setelah Irak dilemahkan melalui udara, Irak kembali mendapatkan serangan darat pada 24 Februari 1991.

Pada 28 Februari 1991, Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, mengumumkan gencatan senjata. Irak pun menyerah kepada Sekutu. Akhir dari Perang Teluk 2 ditandai dengan pengakuan Irak terhadap kedaulatan Kuwait. Selain itu, Irak juga harus menyingkirkan senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir dan kimia yang selama ini digunakan Irak untuk berperang.

Berbeda dengan Perang Teluk 1 dan Perang Teluk 2 yang terjadi antara Irak dengan Iran dan Kuwait, Perang Teluk 3 terjadi antara Irak dan Amerika Serikat. Sekitar tahun 2002, Presiden Bush menegaskan bahwa Irak harus bersih dari senjata pemusnah massal, yang memang dilarang oleh dunia. Selain itu, Saddam Hussein juga dianggap melanggar perjanjian damai setelah Perang Teluk II. Padahal, Irak sebenarnya sudah memiliki itikad untuk tetap menaati perjanjian damai tersebut.

Akhirnya, berdasarkan beberapa anggapan tersebut, Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Irak. Tujuan utama Amerika Serikat adalah melengserkan Saddam Hussein dari pemerintahan Irak.

Jalannya Perang Teluk 3

Pada 19 Maret 2003, Amerika Serikat dan Inggris memulai rangkaian invasi yang diberi kode "Operasi Pembebasan Irak". Amerika Serikat berhasil menaklukan Baghdad, Ibukota Irak pada 9 April 2003. Pada 1 Mei 2003, Amerika Serikat beserta sekutunya berhasil memenangkan perang, dan perang dinyatakan selesai.

Perang Irak
Sumber: wikipedia

Setelah Amerika Serikat berhasil menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein, kekosongan kekuasaan pun terjadi di Irak. Saddam Hussein dihukum gantung pada tahun 2006.

Selama kekosongan kekuasaan terjadi, Amerika Serikat pun mendirikan pemerintahan sementara. Tapi ternyata, di masa pendudukan Amerika Serikat di Irak, mulai muncul perlawanan dari rakyat Irak terhadap Amerika Serikat. Mereka menganggap Amerika Serikat adalah penjajah. Bahkan, ada juga sumber yang mengatakan bahwa, pendudukan Amerika Serikat di Irak bukan semata-mata untuk membebaskan rakyat Irak, melainkan memanfaatkan minyak bumi yang melimpah di Irak.

Akhirnya, rakyat Irak mulai membentuk milisi bersenjata. Amerika Serikat pun menarik pasukannya dari Irak pada tahun 2011. Penarikan pasukan Amerika Serikat tersebut menandai berakhirnya Perang Teluk 3.[9]

[9] 'Mengingat Kembali Invasi Irak ke Kuwait 30 Tahun Lalu'.

Pada tahun baru 2009, tak lama sebelum Obama menjabat, AS menyerahkan kendali Zona Hijau, distrik Baghdad yang berfungsi sebagai markas koalisi kepada pemerintah Irak. Kongres secara resmi mengakhiri otorisasinya untuk perang pada November, dan pasukan tempur terakhir pergi pada bulan berikutnya.

Perang Irak tercatat merenggut lebih dari 100 ribu nyawa. Perkiraan lain menunjukkan bahwa jumlahnya beberapa kali lebih besar, dengan lebih dari 205 ribu kematian warga sipil saja. Sementara dilaporkan bahwa hampir 4.500 tentara AS tewas dan 30 ribu lainnya terluka selama delapan tahun terakhir di Irak.

Selama tiga tahun berikutnya, kekerasan sektarian yang berlangsung berkembang menjadi perang saudara yang hebat. Banyak milisi yang terbentuk selama Perang Irak bergabung atau bermitra dengan kelompok ekstremis di negara tetangga Suriah, yang mengalami perang saudara berdarah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari makalah tentang problematika konflik umat Islam di Suriah dan Irak adalah sebagai berikut, Konflik di Suriah dan Irak telah menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-21, dengan dampak yang meluas secara regional maupun global. Konflik ini tidak hanya menimbulkan penderitaan besar bagi penduduk lokal, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan dunia, menyebabkan perpindahan besar-besaran penduduk, serta menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan di seluruh kawasan Timur Tengah.

Penyebab konflik tersebut sangat kompleks, melibatkan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan agama. Di Suriah, konflik bermula dari protes damai yang menuntut reformasi politik pada awal 2011, tetapi kemudian berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan pemerintah, kelompok oposisi, dan kelompok ekstremis seperti ISIS. Di Irak, faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik pasca-invasi AS tahun 2003, ketidakpuasan etnis dan sektarian, serta munculnya kelompok ekstremis telah memperburuk situasi.

Umat Islam di Suriah dan Irak menjadi korban utama konflik ini, dengan menderita kehilangan jiwa, pengusiran dari rumah mereka, dan trauma psikologis yang mendalam. Konflik ini juga telah memicu konsekuensi kemanusiaan serius, termasuk krisis pengungsi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Upaya penyelesaian konflik di Suriah dan Irak telah melibatkan berbagai aktor regional dan internasional, tetapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan politik yang mencakup semua pihak terlibat telah memperpanjang penderitaan dan ketidakpastian. Solusi jangka panjang untuk konflik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penyelesaian politik yang inklusif, pemulihan ekonomi, dan upaya rekonsiliasi sosial antar berbagai kelompok. Dalam mengatasi problematika konflik umat Islam di Suriah dan Irak, penting bagi komunitas internasional untuk mengutamakan kemanusiaan, mendukung upaya perdamaian yang berkelanjutan, serta memperkuat institusi dan proses demokratisasi di kedua negara tersebut.

Hanya dengan kerjasama global dan komitmen yang kokoh, kita dapat mengakhiri penderitaan umat Islam di Suriah dan Irak, serta membangun fondasi yang lebih stabil dan damai bagi masa depan mereka.

REFERENSI

Agastya, M. ABM. (2013). Arab Spring Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah. Yogyakarta: Ircisod.

Ahmad, Saidiman. (2015). Krisis Air Picu Perang Suriah. (Online). (http://islamlib.com/politik/dunia-islam/krisis-air-picu-perang-suriah/., diakses 12 Desember 2016).

Austin, Steve. (2015). Oil Prices and The Syrian Civil War. (Online). (http://oil-price.net/en/articles/oil-prices-and-syrian- civil-war.php., diakses 18 Maret 2017).

Beauchamp, Zack. (2015). The very simple reason why Syria's war is so hard to end. (Online). (http://www.vox.com/2015/2/2/7963447/s yria-control-territory, diakses 18 Maret 2017).

Brown, M. E. (2008). The Cause and Regional Dimension of Internal Conflict. Dalam Alexius Jemadu, Poltik Global dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

CIA. (2016). The World Factbook, Middle East: Syria. (Online). (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html., diakses 20 Desember 2016).

Davison, John. (2016). Syrian war creates child refugees and child soldiers: report. (Online). (http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-children-idUSKCN0WG0R0, diakses 18 Maret 2017).

Ghafur, M. F. (2015). Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Hermawan, Y. P. (2007). Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Islman Indonesia. (2016). Sejken Ikatan Alumni Suriah Indonesia Angkat Bicara Soal Aleppo. (Online). (https://islamindonesia.id/berita/sekjen- ikatan-alumni-suriah-indonesia-angkat- bicara-soal-aleppo.htm, diakses 18 Maret 2017).

Kennedy, Jr. R. F. (2016). Syria: Another Pipeline War. (Online). (http://www.ecowatch.com/syria-another- pipeline-war-1882180532.html?page=2., diakses 18 Maret 2017).

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Tiara Wacana

Lewis Coser, 1967, Continuities in the Study of Social Conflict. Free Press. New York

Lewis Coser, 1956, the Function of Social Conflict. Free Press. New York.

Margaret. M. Poloma, 1994, Sosiologi Kontemporer. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Jakarta

Larudee, Paul. (2015). Mythology, Barrel Boms, and Human Right Watch. (Online). (http://www.counterpunch.org/2015/07/21/mythology-barrel-bombs-and-human- rights-watch/, diakses 18 Maret 2017).

Mansyur, Ibnu. (2014). Sekilas Mengenal Negara Suriah dan Jumlah Penduduknya. (Online). (http://www.muslimedianews.com/2014/0 3/sekilas-mengenal-negara-suriah- syria.html, diakses 12 Desember 2016).

Maupin, C. T. (2016). The Truth About Syria: A Manufactured Against an Independent Country. (Online). (http://www.mintpressnews.com/truth- syria-manufactured-war-independent- country-2/216688/., diakses 18 Maret 2017).

Ramlan, Subakti., Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1992).

Republika. (2015). Dr. Taufiq Ramadhan al- Buthi Konflik Suriah Konspirasi Zionis. (Online). (http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/12/06/nyxzib1-dr-taufiq-ramadhan-albuthi-konflik-suriah-konspirasi-zionis, diakses 18 Maret 2017).

Subakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

Sulaeman, D. Y. (2013). Prahara Suriah (Membongkar Persekongkolan Multinasional). Penerbit: IIMaN Real.

Sulaeman, D. Y. (2017). Salju di Aleppo. Jakarta: PT. Mitra Media Mustika & ICMES Publisher.

https://www.iemed.org/publication/syrias-civil-war-geopolitical-implications-and-scenarios/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

https://www.iemed.org/publication/syrias-civil-war-geopolitical-implications-and-scenarios/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

https://majalah.tempo.co/edisi/2179/2003-04-20